

# KOMPETENSI PENDIDIK BIDANG KEPARIWISATAAN DI PULAU LOMBOK

Janianton Damanik<sup>1)</sup>, Djoko Wiyono<sup>2)</sup>, M. Baiquni<sup>3)</sup>, & Subagio<sup>4)</sup>

<sup>1),2),3)</sup> Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur J-3, Yogyakarta

<sup>4)</sup> IKIP Mataram, Jl. Pemuda No 59A Mataram

e-mail: antondmk@ugm.ac.id

**Abstract: The Competence of Tourism Human Resources: A Case Study of Teachers in Lombok.**

Lombok Island is currently developing as a popular tourist destination, and it, therefore, demands a large quantity as well as quality of workforce. Educators play an important role in human resource development of the tourism sector. This case study aims to describe the competences of the teachers and lecturers teaching in the tourism departments of vocational high schools, colleges, and universities. The data from focused group discussion and in-depth interview show that in order to improve their professional competences in tourism, those teachers as well as lecturers need regular thematic tourism-based trainings, acceleration of professional teacher's certification, or enhancement of formal education level.

**Keywords:** competence, teachers, tourism, education

**Abstrak: Kompetensi Pendidik Bidang Kepariwisata di Pulau Lombok.** Saat ini Pulau Lombok telah berkembang pesat sebagai destinasi pariwisata. Terdapat tuntutan pemenuhan kebutuhan yang tinggi terhadap standar kualitas sumberdaya bidang kepariwisataan. Artikel hasil penelitian ini memaparkan mengenai kualifikasi kompetensi pendidik dengan bidang keahlian kepariwisataan di Pulau Lombok. Penelitian dilakukan secara kualitatif, dengan wawancara mendalam dan *focus group discussion* sebagai teknik pengumpulan data. Subyek penelitian terdiri atas para pendidik pada jenjang SMK, Akademi, dan Universitas yang memiliki program studi bidang keahlian kepariwisataan. Hasil kajian mengungkap bahwa para pendidik membutuhkan kegiatan-kegiatan pelatihan tematik kontekstual bidang kepariwisataan secara berkelanjutan, percepatan sertifikasi, dan kesempatan menempuh jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan kualifikasi kompetensi profesional.

**Kata kunci:** kualifikasi kompetensi, tenaga pendidik, bidang kepariwisataan

Perhatian pemerintah untuk memanfaatkan potensi pariwisata Indonesia terus meningkat. Hal itu ditunjukkan dengan menyusun rencana dan aksi yang berkelanjutan untuk memanfaatkan secara optimal sumberdaya pariwisata tersebut. Meskipun sumberdaya pariwisata tersebar di semua wilayah Indonesia, tetapi pengembangannya dirahkan secara khusus ke kawasan Bali dan Nusa Tenggara (Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, 2011) dan pada 10 destinasi prioritas (Ratman, 2016) sesuai dengan potensi dan fungsi strategis kawasan tersebut. Dengan ketersediaan infrastruktur yang terandalkan dan dukungan citra positif yang kuat, Bali dapat menjadi *hub* untuk mendistribusikan wisatawan ke provinsi NTB maupun provinsi NTT.

Pilihan pada provinsi NTB dan provinsi NTT sebagai kawasan pengembangan pariwisata utama,

termasuk Labuan Bajo (NTT) dan Mandalika (NTB) sebagai destinasi prioritas berimplikasi pada penyiapan sumberdaya manusia (SDM) yang cepat dan tepat (Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, 2011). Kecepatan dan ketepatan itu sangat dibutuhkan, sebab kebutuhan terhadap tenaga kerja pariwisata terus meningkat bersamaan dengan perluasan infrastruktur fisik pariwisata dan tuntutan mutu layanan yang baik kepada wisatawan. Pembangunan hotel terus bertambah dari tahun ke tahun (BPS Mangarai Barat, 2014) untuk memenuhi permintaan tenaga kerja berkecakupan khusus.

Fakta yang tidak dapat diabaikan adalah rendahnya mutu tenaga kerja pariwisata, baik di tingkat *front-liners* (ILO – Pemprov NTT, 2011) maupun di tingkat penyusun kebijakan (Kristianto, 2013; Kusworo dan Damanik, 2002). Diduga hal ini disebabkan

oleh pendidikan dan keterampilan yang diberikan di tingkat SMK, akademi, sekolah tinggi, hingga universitas belum sesuai dengan output yang ditentukan, sehingga para lulusan kurang mampu bersaing di pasar kerja.<sup>1</sup> Selain itu, kompetensi yang dimiliki oleh calon tenaga kerja pariwisata cenderung tidak mencukupi sebagaimana dipersyaratkan pasar kerja (Rahman dan Tjokropandojo, 2014).

Masalah lain yang belum banyak dibahas dalam berbagai kajian adalah kualifikasi guru. Berbeda dengan kajian SDM di tingkat pelaksana jasa pariwisata, masih sedikit studi mengenai tenaga pendidik yang berperan sebagai transformator dan fasilitator utama calon tenaga kerja pariwisata. Diskursus menangani masalah mutu SDM masih berhenti di hilir yaitu kualifikasi calon tenaga kerja. Persoalan SDM juga menyangkut hingga ke hulu, yakni berkaitan dengan kompetensi tenaga pendidik (Chili, 2014).

Sebagaimana diakui, guru memainkan peran strategis dalam proses pembelajaran dan alih-pengetahuan kepada murid (UNESCO, 1998: 20; Harden & Crosby, 2000). Kompetensi mereka dalam proses pembelajaran sering menjadi sorotan publik, karena masih rendah (*Kompas*, 22 April 2015) dan tidak sesuai dengan standar regional maupun internasional. Rendahnya mutu tersebut diduga akibat kesalahan metode rekrutmen guru, kemiskinan pendidikan dan pelatihan, dan ketiadaan jaminan karier (Wahyudi, 2015).

Dari fakta di lapangan, ditemukan 10 hal terkait kondisi SDM SMK Pariwisata baik di DIY maupun di Pulau Lombok (Puspar UGM, 2015), dan salah satu di antaranya adalah latar belakang pendidikan guru sekolah kejuruan pariwisata relatif sama dengan latar belakang pendidikan guru sekolah menengah umum. Tidak hanya latar belakang pendidikan non-pariwisata, lembaga pendidikan mereka juga hampir semua dari institut keguruan atau universitas pendidikan. Hal ini mengakibatkan transfer pengetahuan hanya mengandalkan metode pengajaran (didaktik) dengan sedikit menekankan substansi kepariwisataan. Selain itu, mereka juga jarang memperoleh pelatihan tambahan berbasis pengalaman bekerja di sektor industri pariwisata. Tentu saja luaran kompetensi yang tercermin pada diri lulusan sekolah atau akademi pariwisata menjadi sangat dipertaruhkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, tulisan ini memetakan kebutuhan dan aspirasi tenaga pendidik di lembaga pendidikan pariwisata untuk peningkatan proses pembelajaran di sekolah dan akademi pari-

wisata di Pulau Lombok. Apakah mereka memiliki kebutuhan kompetensi yang tidak memenuhi, sehingga menjadi kendala di dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran di sekolah atau akademi? Fokus ini sengaja dipilih untuk mengeksplorasi persoalan yang dihadapi oleh mereka di dalam menjalankan fungsi sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran (Harden & Crosby, 2000). Tujuan utama kajian ini adalah untuk menemukan jalan keluar yang paling tepat bagi pendidik dari keterbatasan di dalam menjalankan tugas utamanya dalam lembaga pendidikan pariwisata. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik di lembaga pendidikan pariwisata diharapkan dapat lebih baik yang berdampak positif bagi anak-didik.

Kualitas SDM memainkan peran penting dalam perkembangan pariwisata karena seluruh matarantai kegiatan bersentuhan langsung dengan mereka. Mutu layanan pariwisata sangat bergantung pada kemampuan SDM dalam menghasilkan, memelihara, dan menyalurkan jasa, guna memberikan kepuasan kepada wisatawan (Kusworo dan Damanik, 2002). Kompetensi SDM dalam mutu layanan ikut menentukan daya saing destinasi pariwisata. Kompetensi tersebut terbentuk melalui proses panjang, dan peran pendidik sangat mutlak (Chili, 2014).

Suatu negara yang menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan pembangunan ekonomi, diperlukan komitmen untuk menyediakan layanan jasa pariwisata yang bermutu dan kompetitif. Pelaku atau penyedia layanan jasa bermutu adalah tenaga kerja yang dihasilkan lembaga pendidikan pariwisata. Hal ini menuntut komitmen pemerintah untuk mendorong pengembangan kompetensi tenaga pendidik, khususnya mereka yang menjalankan tugas pokoknya di jenjang sekolah menengah (Chili, 2014). Kompetensi dimaknai sebagai pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Herianto, 2004). Hanya tenaga pendidik yang kompeten mampu menghasilkan calon tenaga kerja yang kompeten.

Permasalahan yang dihadapi adalah mengenai derajat kompetensi para tenaga pendidik untuk menjalankan fungsi dasarnya di lembaga-lembaga pendidikan. Hasil kajian terdahulu menunjukkan bahwa kompetensi tenaga pendidik sering tidak memenuhi standar (Breen et al., 2004; Moreno-Murcia1 et al., 2015; Mondok, 2014), padahal kompetensi tersebut sangat menentukan keberhasilan anak didik mencapai prestasi maksimal (Andriawati et al., 2013). Kompetensi tenaga pendidik tidak terpusat pada kompetensi pedagogik semata (Kartini, 2011), namun juga pada kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian (UU No. 14 Tahun 2005).

<sup>1</sup> Diskusi informal peneliti dengan pelaku bisnis pariwisata di Mataram dan Labuan Bajo, September 2015.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi bidang studi secara luas dan mendalam, materi kurikulum, dan substansi yang menambah wawasan keilmuan (UU No. 14 Tahun 2005). Selain itu, tenaga pendidik perlu memiliki kemampuan penguasaan bidang praktis yang tidak semata berasal dari kurikulum (Wahyudi, 2010). Elemen penting yang ditunjukkan dalam kompetensi adalah profesionalisme. Profesionalisme dimaknai sebagai suatu kondisi ideal yang dimiliki oleh individu ataupun sekelompok pekerja, yang membedakannya dari para kelompok para pekerja lainnya, terkait dengan tindakan dalam bidang keahlian (Creasy, 2015: 23).

Kecakapan melakukan tindakan sesuai bidang keahlian tidak selalu dapat dimiliki oleh tenaga pendidik, khususnya mereka yang menangani bidang keilmuan dengan fokus keahlian pariwisata. Tindakan tersebut berkaitan dengan pengalaman lapangan, kemampuan analitis kritis, penyelesaian masalah, perencanaan yang matang, hingga kepemimpinan (Whitelaw et al., 2009). Tenaga pendidik akan semakin kompeten dan profesional manakala diberikan pelatihan yang mengembangkan kecakapan profesional dengan mempraktekkan sendiri aktivitas yang menjadi bagian dari pembelajaran di kelas. Pelibatan mereka dalam industri menjadi media untuk mendekatkan ke praktek-praktek bisnis dan pengalaman praktis, sehingga proses pembelajaran di kelas bagi anak didik dapat lebih bermakna.

Penguasaan dalam konteks tindakan tidak mudah dibuktikan jika pembelajaran hanya terbatas di kelas. Pembuktian yang paling mudah diamati adalah jika para tenaga pendidik mampu membelajarkan materi yang terkandung dalam kurikulum. Selain itu, tenaga pendidik juga mampu menunjukkan penguasaan teknis melalui kegiatan pengembangan pengalaman praktis sesuai tuntutan kurikulum. Oleh karena itu, konteks kompetensi profesional tenaga pendidik adalah harus menjadi teladan, pendamping, dan pemandu penguasaan teori dan praktek kompetensi bagi anak didik. Anak didik lebih mudah menangkap peristiwa yang secara langsung diperagakan oleh pemandu (tenaga pendidik) dibanding sekedar informasi yang disampaikan secara verbal. Penguasaan substansi materi pembelajaran merupakan amunisi bagi tenaga pendidik untuk melakukan transfer pengetahuan dan pengembangan kecakapan anak didik (Chili, 2014).

Terdapat delapan aspek yang mempengaruhi kompetensi profesional tenaga pendidik di jenjang sekolah menengah kejuruan (Kartini, 2011), yakni pelatihan, kualifikasi akademik, supervisi akademik, pemanfaatan teknologi informasi, leadership kepala sekolah, motivasi, kesejahteraan, dan etos kerja. Pe-

ngaruh kedelapan variabel tersebut berbeda-beda. Pelatihan yang diukur dengan keterlibatan dalam magang, pelatihan khusus, dan peluang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi berpengaruh kuat terhadap pengembangan kompetensi.

Bukti empirik tersebut dapat dirujuk sebagai basis untuk mengetahui kebutuhan tenaga pendidik yang mungkin tidak dapat dipenuhi melalui serangkaian pelatihan di berbagai lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan kejuruan seperti SMK Pariwisata atau Akademi Pariwisata, kebutuhan training bersifat khusus sesuai bidang keahlian dan ketrampilan yang relatif beragam dan spesifik, misalnya: *department front office, food and beverage, house-keeping, accounting*, dan bidang keahlian lain yang terdapat di usaha perjalanan wisata dan pengelolaan destinasi pariwisata. Tenaga pendidik dituntut menguasai tidak saja pengetahuan tentang jenis ketrampilan yang akan ditransfer kepada anak didik, melainkan juga menerapkannya dalam bentuk praktek (Mondok, 2014; Shih, et.al, 2016). Hal demikian menjadi alasan kuat mengenai pentingnya pelatihan bagi tenaga pendidik. Pelatihan secara reguler merupakan kebutuhan penting tenaga pendidik bidang pariwisata untuk memenuhi standar kompetensi.

## METODE

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang beragam dan mendalam dari sumber data yang bervariasi (Baxter dan Jack, 2008). Penggunaan beragam sumber data menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena kelangkaan dan kualifikasi kebutuhan tenaga pendidik pariwisata terhadap berbagai bidang kompetensi yang diperlukan. Data primer diperoleh melalui *in-depth interview* dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan informan yang dipandang merepresentasikan keterwakilan lembaga pendidikan pariwisata di Pulau Lombok. Para informan memiliki profesi sebagai pendidik, yaitu guru dan dosen yang berperan pada lembaga pendidikan kepariwisataan.

Informan dipilih secara purposif, masing-masing tiga orang guru atau dosen dari setiap lembaga pendidikan kepariwisataan di Pulau Lombok. Mereka sengaja diundang untuk hadir dalam kegiatan workshop selama dua hari pada awal bulan Agustus 2016. Undangan ditujukan kepada 15 institusi pendidikan se provinsi NTB, namun demikian hanya 12 lembaga pendidikan yang memenuhinya. Lembaga tersebut terdiri atas enam SMK Pariwisata berstatus negeri, empat SMK Pariwisata berstatus swasta, satu universitas, dan satu akademi. Sekitar 50% dari lem-

baga tersebut memiliki tiga jurusan yang relevan dengan bidang kepariwisataan, yaitu perhotelan, perjalanan wisata, dan tata boga. Lembaga pendidikan dengan status negeri cenderung memiliki jurusan bidang kepariwisataan lebih banyak dibanding yang berstatus swasta. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari publikasi statistik baik berupa Provinsi Dalam Angka dan publikasi dari Biro Pusat Statistik.

Data dikumpulkan dengan secara bertahap, yaitu melalui wawancara pendahuluan mengenai realitas kompetensi dan permasalahan yang dihadapi tenaga pendidik untuk memenuhi kualifikasi kebutuhan profesional mereka dalam bidang kepariwisataan, dan diikuti dengan wawancara mendalam kepada sepuluh informan. Pada tahap akhir dilakukan FGD dengan 30 informan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, sekaligus dilakukan verifikasi dan konfirmasi tentang substansi masalah kualifikasi kompetensi dan ekspektasi mereka pada pengembangan profesional tenaga pendidik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Lombok terletak di sebelah timur Pulau Bali, yaitu pada 115° 46' BT - 116° 80 BT dan 8° 12' LS - 9° 02' LS, terbentang sepanjang kurang lebih 70 km dari sisi Baratdaya ke Timur Laut, dan memiliki luas sekitar 4.738,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 23,51% dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara topografi pulau ini terdiri dari pegunungan di bagian utara, dataran rendah di bagian tengah, dan perbukitan di bagian selatan. Pulau ini juga memiliki Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 meter dari permukaan laut (DPL). Keberadaan Danau Segara Anak di bagian puncaknya (2.000 meter DPL) membuat gunung ini cepat berkembang menjadi salah satu destinasi ekowisata (BAPPEDA Provinsi NTB, 2013).

Pulau Lombok diakui memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan. Kawasan pegunungan dan pantai dengan pasir putih dan pulau-pulau kecilnya menawarkan tempat yang nyaman sebagai destinasi wisata alternatif di luar Bali sejak awal tahun 1990 (Lübben, 1995). Jumlah wisatawan terus bertambah secara signifikan (Aufi, 2013) sejalan dengan penambahan jumlah hotel berkelas internasional. Selama kurun waktu 2015-2019 akan terdapat tambahan 1.500 unit kamar dari jaringan hotel bertaraf internasional di Pulau Lombok (Howarth Hotel, 2015).

Dalam konteks pariwisata, daya tarik utama adalah pada pantai yang mengelilingi dan pulau-pulau kecil, terutama gugus pulau Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketiga pulau tersebut mencatat perkembangan sejak tahun 1980-an berkat pro-

mosi Pemerintah Daerah, namun sayangnya diikuti dengan mencuatnya konflik lahan (Dickerson, 2008; Karim, 2008). Kekayaan ragam budaya kesenian tradisional sebagai cermin kehidupan sehari-hari Suku Sasak semakin meningkatkan daya tarik pulau ini bagi wisatawan (Taufan, 2012).

Sejalan dengan perkembangan kepariwisataan, sejak 10 tahun terdapat penambahan jumlah lembaga-lembaga pendidikan bidang kepariwisataan terutama pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Perkembangan ini dipandang sebagai respon masyarakat dan pemerintah terhadap perkembangan pariwisata (*Informan A*). Di Kota Mataram terdapat lima SMK yang memiliki Jurusan Perhotelan dan/atau Perjalanan Wisata, satu Akademi Pariwisata, dan satu Program Studi Pariwisata di universitas. Sekitar lima tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendirikan satu unit SMK Pariwisata, dilanjutkan pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok tahun 2016 (Rahman, 2016).

Terdapat perbedaan ketersediaan dan kelengkapan infrastruktur, dan tenaga pendidik baik dari segi jumlah maupun kualifikasi. Pada sekolah-sekolah negeri secara relatif memiliki kondisi lebih baik. SMK Negeri 4 misalnya, memiliki lokasi strategis, gedung permanen yang luas dan tertata rapi. Sekolah tersebut merupakan peralihan nama dan fungsi dari Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga. Demikian pula Akademi Pariwisata Mataram memiliki lokasi yang relatif baik dengan dukungan infrastruktur fisik yang baik dan dosen dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai (*Informan D*).

Jumlah anak didik di seluruh sekolah yang dikaji adalah 7.256 siswa, dan sejumlah 523 pendidik, sehingga rasio antara pendidik dan anak didik adalah berkisar 1:14. Merujuk ketentuan pada PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio tersebut sudah tergolong sangat baik dibanding rasio yang ditetapkan yaitu 1:20. Namun perlu dicatat bahwa temuan ini bukanlah representasi setiap sekolah. Jika diamati kasus per kasus, ada sekolah yang memiliki rasio 1:100, dan hal ini berlangsung cukup lama. Selain itu, kualifikasi pendidik tidak selalu memiliki keahlian relevan di bidang kepariwisataan, sebab di sekolah tersebut terdapat beberapa jurusan lain yang tidak memiliki pendidik dengan keahlian relevan (*Informan D*).

Subyek penelitian sejumlah 30 orang dengan karakteristik 48% wanita dan 52% laki-laki, 13% memiliki masa dinas kurang dari dua tahun, 39% dengan masa dinas antara 2-4 tahun, 17% memiliki masa dinas antara 5-7 tahun, dan 31% antara 8-9 tahun masa dinas. Masa dinas tersebut relatif masih pendek, bersesuaian dengan periode pembukaan program studi pada ma-

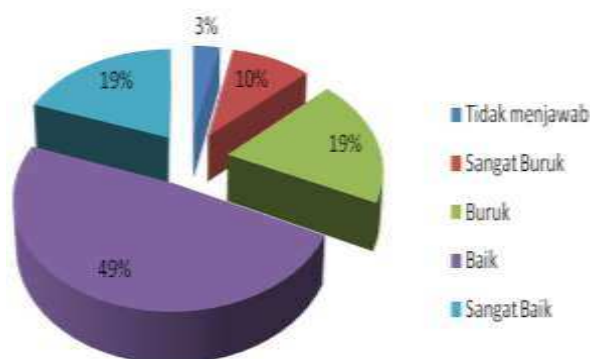
masing-masing lembaga pendidikan yang relatif masih baru. Temuan lain menunjukkan bahwa sekitar 65% pendidik berstatus pegawai tetap baik sebagai PNS maupun yayasan yang bertugas hingga masa pensiun, dan selebihnya berstatus honorer (*Informan D*). Pendidik yang berstatus honorer diangkat untuk menjalankan tugas di lembaga pendidikan dengan jangka waktu tidak tetap dan gaji atau imbalan tidak tetap (*Informan B dan F*).

Menarik untuk dicatat, sebesar 55% tenaga pendidik belum memperoleh sertifikat pendidik profesional, sehingga standar kompetensi tenaga pendidik bidang kepariwisataan belum sepenuhnya terpenuhi, dan dengan kompetensinya mereka menjalankan tugasnya. Gambaran tersebut menjelaskan mengenai persoalan yang selama ini diperdebatkan publik, bahwa mutu lulusan sekolah kejuruan belum sesuai dengan standar yang dibutuhkan dunia kerja (Anonim, 2015). Kajian ini mengungkap bahwa latar belakang pendidik di sekolah-sekolah kejuruan pariwisata dapat dikatakan serupa, yakni pendidikan keguruan umum. Sebesar 61% tenaga pendidik memiliki latar belakang pendidikan non-kepariwisataan. Latar belakang pendidikan umum tersebut mungkin tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk menjalankan tugas pokoknya, namun demikian dirasakan adanya kebutuhan mendesak untuk selalu memperoleh tambahan pengalaman kerja yang praktis (*Informan B*), sehingga tidak melulu berbasis teori pendidikan yang umum (*Informan F*). Pengetahuan dan pengalaman praktek bisnis bidang kepariwisataan dipandang mampu untuk meningkatkan kompetensi profesional yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran (*Informan A*).

Kebutuhan penguatan kompetensi bidang keahlian kepariwisataan merupakan kebutuhan tenaga pendidik, sehingga mereka dapat memenuhi standar kompetensi sebagai tenaga pendidik di lembaga-lembaga pendidikan pariwisata. Kebutuhan tersebut dirasakan oleh sekitar 84% subyek penelitian. Hal demikian menunjukkan bahwa dalam diri tenaga pendidik, terdapat pengakuan atau kesadaran yang tinggi mengenai perlunya peningkatan kompetensi profesional. Selain itu, dirasa kurangnya kesempatan untuk memperoleh pengalaman baru terkait dengan kompetensi profesional mereka. Dinyatakan bahwa "... selalu ada yang berubah cepat di pariwisata ..., dan kami harus segera adaptasi. Ya, kompetensi harus meningkat dan meningkat ... tetapi bagaimana? Peluang terbatas untuk misalnya magang di industri." (*Informan B*). Alasan yang disampaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut cukup beragam, sesuai fakta tentang mutu tenaga pendidik, dan kesempatan untuk mengikuti

pelatihan. Sebanyak 68% subyek penelitian berpendapat bahwa kualitas tenaga pendidik sudah baik dan sangat baik, karena "kami sebenarnya terus meningkatkan kapasitas untuk menjalankan kurikulum" (*Informan A*). Selain itu, "sekolah juga sering bekerja sama dengan industri untuk tukar pengalaman" (*Informan D*), sehingga "sedikit-sedikit mendapat tambahan pengetahuan baru" (*Informan A*).

Namun demikian, terdapat sekitar 29% subyek penelitian mengatakan bahwa kualitas tenaga pendidik masih kurang memadai (Gambar 1). Pandangan ini bersifat subjektif karena tidak diungkap mengenai kriteria baik buruknya kualifikasi tenaga pendidik. Meskipun demikian, hal ini dapat didekati dengan deskripsi yang dinyatakan oleh dua informan. Ukuran pertama adalah "jika tenaga pendidik telah memperoleh sertifikasi" (*Informan A*), sehingga semakin banyak tenaga pendidik di suatu lembaga pendidikan memiliki sertifikat pendidik, maka kualifikasi mereka dipandang baik. Ukuran kedua adalah "sepanjang tenaga pendidik konsisten di bidang studi pariwisata, maka ia lebih bermutu" (*Informan F*), sehingga para pendidik secara konsisten melakukan pengembangan diri sesuai bidang kepariwisataan untuk menjaga kualifikasi profesionalnya.

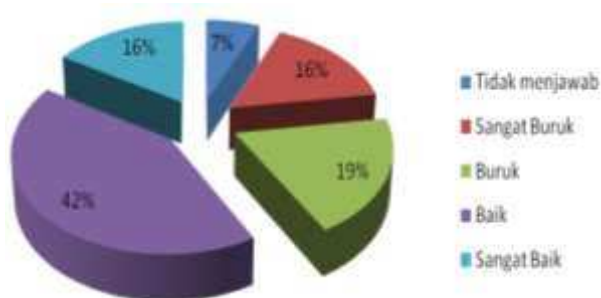


**Gambar 1. Pendapat Subyek Penelitian tentang Mutu Tenaga Pendidik**

Kebutuhan pada pelatihan dipandang mendesak, tetapi kesempatan yang tidaklah senantiasa tersedia. Sebanyak 20% subyek penelitian mengaku mengalami kesulitan memperoleh pelatihan terkait dengan isu-isu kepariwisataan yang menjadi muatan kurikulum (Gambar 2), dan sekitar 16% bahkan mengatakan sangat sulit memperoleh kesempatan tersebut. Namun demikian, secara umum gambaran mengenai kesempatan untuk mengikuti program-program pelatihan adalah relatif baik. Peluang tersebut tampaknya tidak merata dan sangat bergantung pada situasi lingkungan satuan lembaga pendidikan. Pada sekolah-

sekolah berstatus negeri, misalnya, jauh lebih mudah memperoleh kesempatan pelatihan karena “sudah disusun rencana sebelumnya dan diinformasikan kepada semua tenaga pendidik” (*Informan D*), meskipun alokasi yang tersedia “tidak selalu cukup atau bahkan kurang” (*Informan F*).

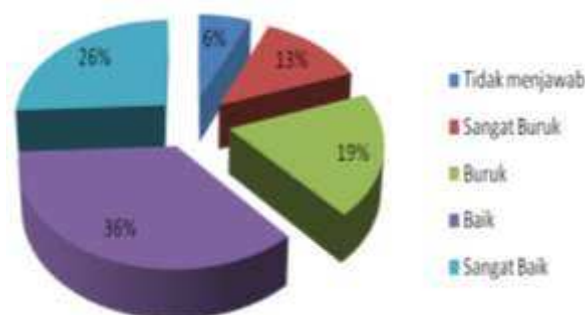
Subyek penelitian memandang bahwa skema pelatihan untuk peningkatan kompetensi profesional pendidik lebih banyak berkaitan dengan pelatihan bidang pedagogi. Penekanan pada strategi dan metode pembelajaran jauh lebih ditonjolkan, sedangkan peningkatan kapasitas terkait substansi materi pembelajaran kepariwisataan masih kurang. Terkait substansi materi, mereka melakukan pengembangan secara mandiri, karena “sebenarnya materinya tidak sulit juga” (*Informan F*) dan “selain bahan yang standar, kami biasanya menggali sendiri dari berbagai sumber” (*Informan A*). Kelemahannya adalah program-program pelatihan tersebut tidak membawa mereka ke pengalaman praktis di dunia industri atau bisnis pariwisata.



**Gambar 2. Pendapat Subyek Penelitian tentang Kesempatan Mengikuti Pelatihan**

Peluang memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional tampaknya tidak mudah bagi para pendidik. Hampir semuanya (sekitar 97%) subyek penelitian sependapat mengatakan bahwa sertifikasi sangat diperlukan untuk menunjang kinerja tenaga pendidik. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan usaha untuk memperoleh sertifikat dipandang sebagai suatu kebutuhan yang terkait erat dengan kompetensi profesional. Bagi mereka, sertifikat tidak hanya memberikan garansi mengenai pengakuan terhadap kompetensi, tetapi juga sebagai “simbol kinerja tenaga pendidik profesional” (*Informan A*), dan sekaligus “berdampak pada kesejahteraan” (*Informan D*). Dengan kata lain, simbol, status, dan kesejahteraan secara bersamaan ikut menentukan capaian sebagai tenaga pendidik dengan kualifikasi kompetensi.

Untuk sebagian besar subyek penelitian, sertifikasi bukan lagi menjadi hal yang perlu dipermasalahkan. Namun demikian, terdapat sekitar 32% subyek penelitian mengaku peluang tersebut sulit diperoleh (Gambar 3). Kesulitan tersebut terkait dengan ketidaksiapan tenaga pendidik memenuhi persyaratan administrasi sertifikasi, khususnya bagi mereka yang memiliki masa kerja antara 1-3 tahun. Dengan masa kerja yang pendek tidak memungkinkan mereka dengan mudah memenuhi ketentuan, seperti sertifikat-sertifikat keikutsertaan kegiatan pelatihan, jam mengajar secara keseluruhan, dan hasil karya akademik. Bagi tenaga pendidik pemula, pemenuhan ketentuan seperti itu memang sulit, meskipun dalam kasus-kasus tertentu ada yang mampu memenuhinya (*Informan A*). Selain itu, status kepegawaian tenaga pendidik juga ikut menentukan. Pegawai berstatus honorer biasanya relatif lebih sulit memperoleh peluang sertifikasi, karena aturannya lebih mengutamakan pendidik yang berstatus pegawai tetap (*Informan B*).



**Gambar 3. Pendapat Subyek tentang Peluang Memperoleh Sertifikat Pendidik**

Di lapangan, terdapat kebutuhan mengenai materi pembelajaran tentang kepariwisataan yang disajikan secara tematik kontekstual bagi para pendidik. Subyek penelitian mengungkapkan bahwa inti keterampilan yang harus diperoleh anak didik adalah bidang pariwisata yang perkembangannya berlangsung sangat cepat, sehingga muncul bidang-bidang keahlian baru dan inovatif, yang secara substantif harus dikuasai oleh tenaga pendidik (*Informan B; Informan E*). Materi pedagogi dipandang lebih efektif jika substansi materi yang dibelajarkan terfokus pada bidang keahlian jurusan dan program studi. Bagi tenaga pendidik, materi-materi tematik kontekstual kepariwisataan, seperti komunikasi interpersonal dan komunikasi lintas-budaya sangatlah diperlukan (*Informan E*), sehingga perlu membekali mereka dengan kemampuan mempraktekkan dalam proses pembelajaran di kelas

(*Informan F*). Bagi tenaga pendidik, pengalaman praktis merupakan kebutuhan mutlak (*Informan B*).

Subyek penelitian sepakat bahwa kegiatan pelatihan yang secara bersamaan diikuti dengan kegiatan pengalaman praktis berkontribusi terhadap peningkatan atau penguatan kompetensi mereka. Mereka semua setuju bahwa pelatihan bertema kepariwisataan memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan tentang industri pariwisata. Meskipun tidak dijelaskan tema-tema spesifik mana yang perlu dijadikan materi pelatihan, namun setidaknya diperoleh informasi bahwa pelatihan-pelatihan bertema pariwisata diperlukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik (*Informan F*).

Selain pelatihan tematik kontekstual kepariwisataan, tenaga pendidik memandang peningkatan jenjang pendidikan sebagai suatu kebutuhan. Hal tersebut merupakan upaya mencapai pemenuhan kualifikasi kompetensi tenaga pendidik profesional. Urgensi mengenai pendidikan lanjut ini dirasakan oleh hampir keseluruhan subyek penelitian. Sekitar 66% subyek penelitian menyatakan sangat ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dan selebihnya tidak secara eksplisit menyatakan keinginannya tersebut. Keinginan tersebut terutama pada pendidikan tinggi berbasis kepariwisataan.

Temuan penelitian ini memiliki makna menarik bahwa tenaga pendidik memandang kompetensi profesional mereka berkaitan dengan atau dipengaruhi oleh raihan jenjang pendidikan lebih tinggi. Rendahnya kapasitas profesional yang dimiliki berbasis pada jenjang pendidikan yang mereka sandang saat ini, tampaknya para pendidik merasakan keterbatasan intelektual untuk menjalankan fungsi pokoknya. Hal demikian dapat dipahami, karena proses pembelajaran di sekolah tidak lagi bertumpu pada persoalan pengetahuan semata, tetapi sudah dituntut untuk menjelaskan *know-how*-nya. Tenaga pendidik semakin ditantang untuk mampu mengajak anak didik berpikir tentang bagaimana dan mengapa suatu pekerjaan diselesaikan (Subanji, 2015). Melalui keikutsertaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, setingkat magister dalam bidang kepariwisataan, akan berimbas kepada praktek-praktek pembelajaran di kelas.

Kuatnya asumsi di kalangan pendidik bahwa pendidikan yang lebih tinggi akan mempermudah keikutsertaan dalam proses sertifikasi (*Informan D*), sebab dengan sendirinya berkembang kemampuan

intelektual. Selain itu, pendidikan yang lebih tinggi juga dipandang sebagai sarana untuk senantiasa mengasah profesionalitas (*Informan A*). Kuatnya orientasi untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi tersebut karena anggapan bahwa ijazah merupakan simbol kompetensi (*Informan E*) atau sebagai pengakuan atas kemampuan intelektual seseorang (*Informan E*). Selama nilai tambah yang melekat pada ijazah pendidikan tinggi setara dengan status kompetensi, maka tenaga pendidik akan terus berusaha mendapatkannya.

## SIMPULAN

Studi ini mengungkap belum terpenuhinya kecukupan kualifikasi kompetensi spesifik bidang keahlian kepariwisataan sebagaimana dirasakan oleh tenaga pendidik di SMK dan perguruan tinggi di Pulau Lombok. Kebutuhan yang tidak terpenuhi itu dipandang sebagai salah satu kendala dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di kelas untuk mencapai kualifikasi kompetensi lulusan. Tenaga pendidik merasakan adanya kebutuhan yang tinggi baik pada dimensi pedagogik maupun dimensi pembelajaran diri melalui praktek pengalaman kerja dalam dunia industri pariwisata. Selain itu, tenaga pendidik juga membutuhkan bentuk-bentuk pelatihan tematik kontekstual bidang kepariwisataan sebagai cara untuk meningkatkan kualifikasi kompetensi profesionalnya. Adanya pandangan di kalangan tenaga pendidik bahwa mereka menganggap perlunya peningkatan jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi di bidang keahlian kepariwisataan untuk memenuhi standar kualifikasi kompetensi profesional.

Rekomendasi sesuai hasil penelitian, yaitu memberikan tawaran secara terbuka kepada tenaga pendidik untuk melakukan praktek magang kerja di bidang industri pariwisata, untuk kurun waktu antara satu hingga dua bulan. Pengalaman yang mereka rasakan dan saksikan secara langsung di dunia kerja merupakan realitas dari situasi yang akan digeluti oleh siswa kelak baik pada saat melakukan praktek industri maupun ketika sudah memasuki dunia kerja. Perlunya kesempatan bagi pendidik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan tematik kontekstual bidang kepariwisataan secara berkala sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang tersedia di lembaga pendidikan masing-masing. Adanya kesempatan dan dukungan beasiswa bagi para pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi secara formal.



## DAFTAR RUJUKAN

- Andriawati, E., Mashudi, & Utomo, B.B. 2013. *Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA*. (Online) *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(10): n.p. ([jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/3729](http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/3729)) Diakses 12 September 2016.
- Anonim, 2015. *BNSP: Kualitas Tenaga Lulusan SMK Belum Sesuai yang Diharapkan Industri* (<http://www.beritasatu.com/pendidikan/312762-bnsp-kualitas-tenaga-lulusan-smk-belum-sesuai-yang-diharapkan-industri.html>) diakses 11 September 2016.
- Aufi, A. 2013. *Understanding host community's experience in establishing and developing small tourism enterprises in Lombok, Indonesia*. (Online) Unpublished Dissertation, Griffith Business School University. [https://www120.secure.griffith.edu.au/rch/file/4564b12f.../Saufi\\_2013\\_02Thesis.pdf](https://www120.secure.griffith.edu.au/rch/file/4564b12f.../Saufi_2013_02Thesis.pdf). Diakses 12 September 2016.
- Bappeda Provinsi NTB. 2013. *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2012*. Mataram: BPS.
- Baxter, P., & Jack, S. 2008. Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4): 544-559.
- BPS Kabupatn Mangarai Barat. 2014. *Kabupaten Mangarai Barat Dalam Angka, 2013*. Labuan Bajo.
- Breen, H., Walo, M., & Dimmock, K. 2004. *Assessment of tourism and hospitality management competencies: a student perspective*. Melbourne: School of Tourism and Hospitality Management, Southern Cross University.
- Chili, N.S., 2014. The Ecology of Teaching: Efficiency, Efficacy and Effectiveness of Teaching and Learning of Tourism in Township High Schools. *Journal of Human Ecology*, 48(2): 299-312.
- Creasy, K.L. 2015. Defining Professionalism in Teacher Education Programs. *Journal of Education & Social Policy*, 2(2): 23-25.
- Dickerson, H. 2008. Trouble in Paradise: A land conflict on the tourist island of Gili Trawangan dates back decades. *Inside Indonesia* (<http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/trouble-in-paradise>). Diakses 5 Juni 2016.
- Harden, R.M., & Crosby, J.R. 2000. The good teacher is more than a lecturer – the twelve roles of the teacher. *Medical Teacher*, 22(4): 334-347.
- Herianto, E. 2004. Otonomi Guru pada Era Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, (Online) 11(1): 1-16. (<http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/84/1433>) Diakses 1 Oktober 2016.
- Howarth Hotel. 2015. *Hotel & Branded Residences Lombok*. ([horwathhtl.com/files/2016/01/MR2-Indonesia-Lombok.pdf](http://horwathhtl.com/files/2016/01/MR2-Indonesia-Lombok.pdf)). Diakses 3 Oktober 2016.
- ILO – Pemprov NTT. 2011. *Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan Kupang, NTT*. ([www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo.../wcms\\_171333.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo.../wcms_171333.pdf))
- Kartini, T. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Profesional Guru di SMK Negeri Losarang, Kabupaten Indramayu*. Departemen Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Indonesia. (Tesis tidak dipublikasikan). Jakarta.
- Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025*. Jakarta: Kemenko Perekonomian.
- Kristianto, Y. 2013. Sertifikasi Kompetensi sebagai Modal Perangkat Infrstruktur SDM Menghadapi Pasar Global. *Analisis Pariwisata*, 13(1): 86-96.
- Kusworo, H.A., & Damanik, J. 2002. Pengembangan SDM Pariwisata Daerah: Agenda Kebijakan untuk Pembuat Kebijakan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1): 105-120.
- Lübben, C. 1995. *Internationaler Tourismus als Faktor der Regionalentwicklung in Indonesien: untersucht am Beispiel der Insel Lombok*. Berlin: Dietrich-Reimer Verlag.
- Mondok, A. 2014. Contradiction Expectation for Competence Enhancement in Tourism and Catering Education. *International Journal of Arts & Sciences*, 7(6): 215-233.
- Moreno-Murcia1, J.A., Torregrosa, Y.S., & Pedreño, N.B. 2015. Questionnaire evaluating teaching competencies in the university environment: evaluation of teaching competencies in the university. *New Approaches in Educational Research*, 4(1): 54-61.
- Puspar UGM. 2015. *Riset Aksi Partisipatif Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pariwisata di Koridor Bali-Nusa Tenggara*. (Laporan riset tidak dipublikasikan). Yogyakarta: LPPM-UGM.
- Rahman, B. 2016. *Sekolah Politeknik Pariwisata Lombok Terima Pendaftaran Tahun Ini*. (<http://www.lombokita.com/pendidikan/sekolah-politeknik-pariwisata-lombok-terima-pendaftaran-tahun-ini>).
- Rahman, N.A., & Tjokropandojo, D.S. 2014. Kapasitas Sumber Daya Manusia Lokal Pada Industri Pariwisata Perhotelan di Kelurahan Kuta, (Online) *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 3(4): 361-371. ([sappk.itb.ac.id/jpwk2/wp-content/uploads/2014/08/Nur-Abdu-Rahman.pdf](http://sappk.itb.ac.id/jpwk2/wp-content/uploads/2014/08/Nur-Abdu-Rahman.pdf)). Diakses 17 September 2016.
- Ratman, D. R. 2016. *Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas, 206-2019*. ([www.kemenpar.go.id/userfiles/Paparan%20-%20Deputi%20BPDIP.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Paparan%20-%20Deputi%20BPDIP.pdf))
- Shih, C-L., Liao, C. W., Lin, C-F., & Liao, T-K. 2016. A Study on Hospitality and Tourism Teachers' Teaching Competence to Use Inquiry-Based Teaching into "Project Study" Curriculum of Senior High and Vocational Schools, (Online) *International Journal of Information and Education Technology*, 6(11): 904-908. ([www.ijiet.org/vol6/814-E15.pdf](http://www.ijiet.org/vol6/814-E15.pdf)). Diakses 17 September 2016.



- Subandji. 2015. Peningkatan Pedagogical Content Knowledge Guru Matematika dan Praktiknya dalam Pembelajaran Melalui Model Pelatihan TEQIP. (Online) *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 21(1): 71-79. Diakses 1 Oktober 2016.
- Taufan, N.A. 2012. *Berbagai Kesenian Sasak Samawa Mbojo*. Bima: Museum Kebudayaan Samparaja.
- UNESCO, 1988. *World Education Report 1998: Teachers and teaching in a changing world*. UNESCO: Paris.
- Wahyudi, J. 2015. *Mengapa Mutu Guru Indonesia Rendah?* ([http://www.kompasiana.com/johanmenulis-buku/mengapa-mutu-guru-indonesia-rendah\\_55484f54547b61e50d2523f8](http://www.kompasiana.com/johanmenulis-buku/mengapa-mutu-guru-indonesia-rendah_55484f54547b61e50d2523f8)). Diakses 1 Oktober 2016.
- Wahyudi. 2010. Standar Kompetensi Profesional Guru. (Online) *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 1(2):107-119. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=33605&val=2346>. Diakses 28 September 2016.
- Whitelaw, P.A., Barron, P., Buultjens, J., Cairncross, G., & Davidson, M. 200). *Training needs for the hospitality industry*. Gold Coast: CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd.